

EKSISTENSI PEMERINTAHAN ADAT KAMPUNG YOKA HEBAEIBULU DALAM TATA PEMERINTAHAN KOTA JAYAPURA

WILSON OLUA*

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNCEN tahun 2010

* Jln. Yoka-Arso, Kampung Yoka-Jayapura

Abstrak : *Penelitian ini lebih diarahkan pada aktivitas pemerintahan adat yang masih eksis sampai sekarang dan memberi dampak bagi kehidupan masyarakat suku Hebaeibulu di tempat leluhurnya di Kampung Yoka. Disisi lain berlangsung juga pemerintahan modern di Kampung Yoka. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Interview, Studi dokumen. Yang diteliti pada penelitian ini adalah situasi sosial. Penulis menggunakan informan kunci (key informan) terhadap situasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pemerintahan Hebaeibulu Kampung Yoka mengalami perkembangan yang signifikan dan masih eksis beraktifitas. Hal ini ditandai dengan kepatuhan dan ketaatan masyarakat di Kampung Yoka terhadap kepemimpinan Ondoafi dengan system dan mekanisme pemerintahan adatnya.*

Kata Kunci : Eksistensi, Pemerintahan, Adat, Kampung

Abstract : *This research is concern about the traditional government activity that still exist until this day and give an impact for the people's live in the place of Hebaeibulu tribe in Yoka village. In another side the modern government is also exist in Yoka village. This research is qualitative research and the data collection technique is observation, interview and document study. The focus of this research is social situation and the writer using key informan toward the social situation. The result of this research show that the government system of Habaeibulu Yoka village sustain with the significant progress and still doing daily activity. It can be seen that the people in this village obey and loyal to the traditional government and mechanism system of leadership of head village (ondoafi).*

Key Words: *Existence, Traditional Government, Village*

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa Yoka adalah sebuah wilayah terisolir yang didiami oleh suku yang di sebut Masyarakat Adat Hebaeibulu. Wilayah Adat ini Selanjutnya disebut Tanah Adat Yoka. Meski demikian keberadaan masyarakat ini dari waktu ke waktu mengalami banyak perubahan. Hal ini dimulai dengan kesadaran mereka membuka diri menerima perubahan dan menjadi masyarakat modern dengan mengadopsi serta menjalankan paradigma atau filosofi hidup tiga tungku. Tiga tungku itu terdiri dari atas Adat, Pemerintah Daerah (Formal) dan pihak gereja dalam hal ini GKI Jemaat Eben Heizer Yoka.

Dalam perfektif tiga tungku inilah kemudian Masyarakat Adat Hebaeibulu mengalami banyak perubahan. Sebelumnya segala sesuatu sangat di tentukan oleh adat. Segala aspek kehidupan diatur dan dipengaruhi oleh penata – penata adat yang demikian kental, sehingga membentuk struktur sosial dalam berbagai aktifitas kehidupan masyarakatnya. Kendati struktur adat yang demikian kental namun tidak bisa di sangkal juga bahwa perubahan dan tuntutan perkembangan zaman telah mengiring perkembangan masyarakatnya untuk menerima berbagai perubahan, dengan kehadiran gereja dan kemudian diikuti dengan pemerintahan.

Fakta sejarah menjelaskan bahwa lahirnya pemerintahan di Tanah Papua diawali dari kehadiran Gereja melalui para utusan – utusan injil yang datang untuk mengatakan kabar keselamatan bagi masyarakat di Tanah Papua (dahulu disebut Nieu Guinea). Kehadiran Gereja dan Pemerintah merupakan awal lahirnya masa “Terang” bagi manusia suku yang di sebut orang Yoka. Hal ini dimulai pada 2 Januari 1956 yang mengisahkan irang Yoka Hebaeibulu keluar dari kegelapan dan menjemput “Peradaban” yang memberikan “Terang hidup”. Disebut demikian karena pada masa lalunya penuh dengan pertikaian, keterbelengguan dengan ikatan adat-istiadat yang sangat kental, sacral dan tidak bisa di tawar-tawar yang kemudian dinilai sebagai “Kegelapan”.

Masa terang dipandang sebagai masa dimana orang Yoka hidup sebagai manusia beradab yang pemerintahannya beragama dan beradat - istiadat sakral dengan kelahirannya yang baru dengan kelahiran Yesus Kristus sesuai motto Gereja Kristen Injil (GKI) Di Tanah Papua, yakni “Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang didalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang” (Efesus 5:8). Terang injil Yesus Kristus merupakan panduan utama bagi manusia suku Hebaeibulu untuk hidup. Walau demikian, Yoka juga memiliki catatan – catatan tersendiri mengenai aktifitas kehidupan bermasyarakat yang masih terlihat sampai sekarang. Hal itu dapat terlihat melalui keberadaan “Tiga tungku” yang demikian berperan dalam struktur masyarakat suku Hebaeibulu di Kampung Yoka, Distrik Heram.

Diakui bahwa dalam kehidupan modern seperti sekarang, tidak semua sendi-sendi kehidupan di kampong Yoka di dominasi oleh kekuatan Adat. Pengaruh gereja dan “Pemerintah Formal” pun telah cukup memberi warna yang berbeda terhadap totalitas kehidupan, masyarakat di Kampung Yoka. Meskipun demikian, penelitian ini lebih diarahkan pada aktivitas pemerintahan adat yang masih eksis sampai sekarang dan memberi dampak bagi kehidupan masyarakat suku Hebaeibulu di tempat leluhurnya di Kampung Yoka.

Untuk Meneropong Eksistensi Pemerintahan Adat Suku Hebaibulu di Kampung Yoka maka penulis menggunakan teori organisasi yang di kemukakan oleh Stephen P. Robbins. Hal ini penulis gunakan karena dalam pemahaman penulis bahwa pemerintahan Adat Hebaeibulu dipandang sebagai sebuah organisasi yang didalamnya ada manusia, wadah, aktifitas dan tujuan yang hendak di capai. Selain itu, fenomena yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah Struktur Organisasi Pemerintahan Adat. Dalam perspektif ini Robbins menyatakan bahwa untuk mengukur struktur sebuah organisasi maka harus berangkat dari elemen – elemen dasar seperti Spesialisasi (kekhususan), departementalisasi (pembidangan), rentang kendali, rantai komando, sentralisasi/desentralisasi serta formalisasi atau penerapan aturan – aturan dalam organisasi atas dasar itu maka teori organisasi yang dikemukakan Stephen P. Robbins dipandang tepat untuk mengukur eksistensi Pemerintahan Adat Hebaeibulu di Kampung Yoka, Distrik Heram Kota Jayapura.

Dalam penelitian ini penulis memandang bahwa UUD 1945 cukup fleksibel dan memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur siklus pemerintah daerah berdasarkan nilai – nilai kultur yang di anut dan menjadi ciri khasnya. Selain itu UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pun member ruang dan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat untuk melestarikan nilai – nilai budaya yang menjadi kearifan lokal sehingga menjadi landasan yuridis dan pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Pemerintahan Adat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia

Selain sebagai landasan Yuridis, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan sejumlah hal sebagai data – data awal dalam penelitian ini yakni Pemerintahan Adat Kampung Yoka. Kampung Yoka didiami oleh 5.270 jiwa. Penduduk di Kampung Yoka "diatur" oleh tiga tungku yang saling berkoodinasi yakni "Pemerintahan Adat Hebaeibulu Yoka, Gereja Kristen Injili Jemaat Eben Haeizer Yoka dan Pemerintahan Kampung yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Jayapura sebagai Pemerintah Formal. Berdasarkan hal-hal yang di sebutkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Eksistensi Pemerintahan Adat Hebaiebulu Yoka dalam Tata Pemerintahan Kota Jayapura di Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Observasi, Interview, Studi dokumen*. Yang diteliti pada penelitian ini adalah situasi sosial. Penulis menggunakan informan kunci (*key informan*) terhadap situasi social. Artinya memiliki orang – orang kunci yang di anggap sangat memahami dan mengerti masalah yang di teliti (Sugiyono,2010:49-50).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian tentang pemerintahan adat yang diukur melalui struktur organisasinya. Hal ini dimaksud untuk memberikan arahan dan penjelasan terkait dengan eksistensi Pemerintahan Adat Yoka Hebaeibulu dalam tata pemerintahan di Kota Jayapura. Untuk itu, sebagai cara untuk memahami eksistensinya maka teori Organisasi yang disampaikan Stephen P. Robbins, menyatakan bahwa tugas dibagi, dikelompokan,dan dikoodinasikan secara formal(*Robbins* 2008 :215) serta membaginya menjadi elemen- elemen antara lain Spesialisasi, Depertementalisasi, Rantai Komando, Sentralisasi/Desentralisasi dan formalisasi akan digunakan sebagai dasar teori dalam menjelaskan eksistensi pemerintahan adat suku Hebaeibulu sebagai berikut.

Sejarah

Yoka merupakan kampung yang di akui keberadaannya sejak tahun 1956. Sejarah berdirinya, Yoka sebagai sebuah kampung berawal dari pengelolaan secara adat yang kemudian membentuk pemerintahan kampung sendiri yang di perintah oleh seorang kepala pemerintahan kampung. Berbeda dari ondoafi, yang bertanggung jawab kepada pemerintah seperti kepala distrik atau walikota. Pertama kali Pemerintahan kampung Yoka diangkat pada Tahun 1958 dan disebut dengan sebutan "*korano*". Sebutan ini mengikiti seluruh sistem pemerintahan yang berlaku secara menyeluruh di Tanah Papua pada waktu itu. Pada masa kekuasaan Belanda, seorang kepala kampung disebut dengan sebutan "*korano*" dan sebagai pimpinan pemerintahan terendah secara adminitrasi bertanggung jawab kepada seorang *Bestuur*. Dan *Bestuur* bertanggung jawab kepada *Residen*, sedangkan residen bertanggung jawab kepada seorang Gubernur.

Yoka pada tahun 1956 sebagai suatu Kampung berada di bawah wilayah *Afdeeling* (divisi) Hollandia dan *Onder Afdeeling* (setingkat kecamatan) *Government Netherland Nieuw Guinea* (Pemerintahan Belanda di Papua). Gubernur Netherland – Nieuw Guinea pada saat itu adalah Dr. J. Van Baal, sedangkan *De Hoofdbestuur* (Bupati) adalah Ch. K. Jonase. Korano pertama yang ditunjuk dan dipercaya oleh masyarakat adat Hebaeibulu adalah Luis Mebri. Yoka berdiri sebagai sebuah kampung yang mandiri dibawah Bestuur Tobati, disahkan pada tanggal 19 Desember 1956 di Kampung Ayapo dimana proses pembentukan dan pengesahan tersebut diawasi langsung oleh Residen Lawers dan ikut menyaksikan juga Bapak Dr. I. S. Kijne.

Secara Pemerintahan, Yoka telah merancang dan mengusulkan pembentukan kampung sendiri sejak tahun 1956. Pada tahun 1955, orang – orang tua Yoka telah mengajukan permohonan untuk berpemerintahan sendiri kepada kepala pemerintahan Hollandia "*Hollandia De Hoofdbestuur*". Di dalam surat balasan dari kepala pemerintahan Hollandia diketahui bahwa rancangan pembentukan kampung ini dimulai sejak tanggal 9 Mei 1955. Pada tanggal tersebut orang – orang tua telah menyurati pemerintahan *Afdeeling* untuk meminta pembentukan kampung. Dan proposal pengusulan pembentukan kampung tersebut di jawab pada tanggal 19 Desember 1956, dan tanggal ini adalah penegasan untuk berdirinya kampung Yoka.

Struktur Pemerintahan Adat

Dalam penelitian ini Pemerintahan Adat Hebaeibulu di Kampung Yoka, dilihat sebagai sebuah "organisasi". Sehingga untuk mengukur eksistensi tata pemerintahan formal di Kampung Yoka dapat dilakukan karena dapat merujuk dari pemahaman penulis mengenai teori organisasi yang dikemukakan oleh Stephen P. Robins. Bahwa untuk mengukur perilaku organisasi dalam hal ini pemerintahan Adat Hebaeibulu Yoka, maka faktor utama yang menjadi fokus adalah struktur organisasinya yang didalamnya terdapat elemen Spesialisasi, Departementalisasi, Rentang Kendali, Rantai Komando, Sentralisasi/Desentralisasi serta Formalisasi.

Spesialisasi Tugas – Tugas (Work Specialization)

Hakikat dari spesialisasi tugas – tugas adalah memberi kemudahan dan kecakapan kepada seorang individu dalam melakukan tugas karena secara struktur melekat tugas – tugas utama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tugas – tugas dibagi sesuai dengan hirarki, tanggung jawab, dan kewenangan yang melekat pada tugas tersebut. Dalam struktur organisasi Pemerintahan Adat Hebaeibulu, Spesialisasi tugas – tugas itu dapat digambarkan dalam jabatan sebagai berikut

Ondoafi

Dalam struktur organisasi pemerintahan Adat Hebaeibulu Yoka, Ondoafi berada pada urutan teratas. Ia menjadi menjadi kepala dan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

- Memimpin dan mengkoordinir Pemerintahan Adat Hebaeibulu Yoka;
- Menjalin hubungan damai dan berhak menyatakan "perang";
- Memegang hak tanah dan air sebagai waris dari nenek moyang pendiri suku atau kampung;
- Menunjuk dan mengganti kepala suku bagi klen-suku dalam kampungnya;

- Membayar Emas Kawin bagi anak lelaki pertama dari keturunan suku – suku yang ada di kampungnya.

Abu Afa

Setelah Ondoafi, pada posisi berikut adalah Abu Afa. Sosok ini memiliki tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan yang diberikan padanya tidak kecil karena tugas pokoknya antara lain;

- Memilih, mengusahakan dan mencalonkan bakal calon pengganti *Ondofolo* dari 5 (lima) *Ondofolo Fafa*.
- Menegur, menasehati dan mengarahkan *Ondofolo*.
- Menjaga, atau mengajarkan ataupun memberitahukan kepada warga masyarakat secara bertanggung jawab dengan baik dan benar demi kehidupan yang sejahtera.
- Memegang rahasia Kutukan dan Berkat bagi kampung.

Abu Akho

Dalam hiraki selanjutnya, setelah Abu Afaa, maka ada Abu akho yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

- Memberi pengumuman dan menyatakan semua keputusan *ondofolo*, kepada masyarakat adat.
- Menyampaikan berita kematian, berita pembayaran emas kawin dan bertugas untuk setiap hajatan di rumah Ondoafi sesuai perannya.
- Menjadi juru bicara bagi Ondoafi di setiap pertemuan.

Ondofolo Fafa

Selain *Abu Afaa*, dan *Abu Akho* adalah *Ondofolo Fafa*. *Ondofolo Fafa* ini wajib berpartisipasi dalam hajatan kampung dan berani berkorban demi masyarakatnya. Tugas tanggung jawab mereka pada intinya adalah belajar menjamin keselamatan, kemakmuran, kejayaan, dan kesejahteraan warga masyarakat biasa.

Ime Ei Ondofolo

Ime Ei Ondofolo adalah lembaga adat yang bertugas mengatur urusan rumah tangga dari *Ondofolo*. Mereka bertugas sebagai tata urusan kedalam atau internal rumah tangga *Ondofolo* khusus dalam hal keseimbangan Ekonomi. Sebagai lembaga keseimbangan Ekonomi *Ondofolo*, lembaga ini berperan penting secara adat dan budaya untuk menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat.

Yo Ondofolo

Tugas kedua dari orang ini sebagai perpanjangan tangan dari *Ondofolo* dalam memerintah dan atau mengatur masyarakat. Kehadiran mereka di tengah masyarakat sejatinya melambangkan kehadiran *Sang Ondofolo* di tengah masyarakat, dan hal ini secara normatif berarti segala yang di sampaikan kepada masyarakat adalah suara *ondofolo*.

Khote Mahembai

Tugas khote mahembai adalah sebagai perpanjangan tangan dari Ondofolo dalam menggordinir kerja dalam sukunya masing – masing.

Yo Yang/Ondofolo Obho Yokhu

Dalam keondoafian Yoka Hebaeibulu, kelompok kecil bertugas melayani ondoafi dalam hal menari di *Obe* (balai Adat kampung), atau tempat mana saja yang di tunjuk. Bekerja baik di kebun maupun di danau mempersiapkan hasil hutan dan danau dalam kepentingan – kepentingan kampung. Untuk hal ini kekuasaan adat mereka dibagi berdasarkan sumber daya alam.

Departementalisasi (Departementalization)

Setelah memecah – mecah pekerjaan melalui spesialisasi, perlu dikelompokkan bersama sehingga tugas – tugas yang sama dapat di koordinasi dalam satu basis. Dasar pengelompokan bersama tugas ini disebut dengan departementalisasi (*departementalization*). Tentu saja, departementalisasi berdasarkan fungsi dapat digunakan pada semua jenis organisasi. Hanya saja fungsi tersebut dapat berubah jika bercernin pada tujuan dan aktifitas Pemerintahan Adat Hebaeibulu Yoka. Sebagai suatu organisasi non formal, departementalisasi berdasarkan fungsi juga terdapat pada Pemerintahan Adat Hebaeibulu, yaitu terdiri atas :

- Ondiafi : Pemimpin tertinggi di kampung
- Abu Afa : Dewan adat tertinggi
- Abu Akho : Pesuruh, pembantu, atau Pelayan
- Ondofolo Fafa : Ahli waris tahta keondoafian
- Ime Ei Ondofolo : Lembaga Keseimbangan Ekonomi
- Yo Ondofolo : Memerintah dan mengatur masyarakat
- Khote Mehembai : Asosiasi 5 kepala suku Besar
- Yo Yang / Ondofolo Obho yokhu : Rakyat biasa
- Bu ondofolo : Penguasa atas Air
- Khani Ondofolo : Penguasa atas tanah

Rantai Komando (*chain of command*)

Prinsip Kesatuan komando (*unity-of-command*) membantu melanggengkan konsep garis wewenang yang tidak terputus. Seiring dengan perkembangan dan waktu berubah terus menerus dan demikian juga prinsip – prinsip dalam desain organisasi, konsep rantai komando, wewenang, dan kesatuan komando sudah tidak lagi terlalu relevan saat ini karena kemajuan teknologi informasi dan trend kearah pemberdayaan bawahan. Rantai komando dalam Pemerintahan Adat Yoka Hebaeibulu sebagai organisasi non formal, dapat kita lihat berikut ini

- Ondofolo

Ondofolo adalah pimpinan tertinggi di kampung “yo”. Secara pemerintahan adat, *ondofolo* memegang kekuasaan dalam mengatur, memerintah dan mengendalikan masyarakat.

- *Abu Afa*
Abu Afa adalah kelembagaan dewan adat tertinggi yang ada dalam kampung. Lembaga ini di kenal juga sebagai "*yo malo*". Lembaga ini terdiri dari anak – anak adat yang memiliki pengaruh dan kuasa. Kekuasaan mereka dipercaya bisa mendatangkan berkat ataupun kutuk bagi kampung dan masyarakat.
- *Abu Akho*
Abu akho adalah suatu lembaga adat yang dapat berperan baik untuk pribadi dari suatu keluarga atau kampung. *Abu Akho* bisa dikatakan sebagai pesuruh, pembantu atau pelayan, namun disisi lain *Abu Akho* juga adalah seorang bendaharawan yang bertugas menjaga, mengawasi, dan menyalurkan Harta.
- *Ondofolo Fafa*
Ondofolo Fafa adalah sebuah lembaga adat kampung yang terdiri dari lima anak laki – laki *Mebri* yang dianggap tertua dari masing – masing keluarga yang memiliki hubungan bapak – bapak bersaudara dari satu moyang mendiang *ondofolo* pertama, *Melamensa*. Mereka ini adalah anak – anak yang memiliki hak sebagai anak - anak *ondofolo* dan dipandang sebagai kakak dan atau seperti pangeran yang dipingit oleh lembaga adat *Abu Afaa*.
- *Ime Ei Ondofolo*
Lembaga ini berperan penting secara adat dan budaya untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan mereka atas air dan tanah. Karena itu lembaga ini terdiri dari *bu Ondofolo* "penguasa atas air" dan *khani Ondofolo* "penguasa atas Tanah". Mereka bekerja dan mengatur pendistribusian ekonomi sesuai dengan tradisi "*obo buru*".
- *Yo Ondofolo*
Lembaga ini terdiri dari dua orang yang secara struktur berada di bawah *ondofolo* dan di atas "*yoyo khoteyo*". Dalam hal sosoal ekonomi kedua orang ini yang sangat berperan aktif untuk mempersiapkan kebutuhan – kebutuhan tersebut bagi masyarakat kampung. Kedua orang ini secara bersama – sama dengan *yo khoteyo*.
- *Khote Mehembai*
Khote Mahembai artinya lima kepala suku, *Khote* berarti "kepala suku", dan *Mehembai* berarti "lima". Lima kepala suku sering disebut juga dengan *Yoyo Khoteyo* atau *Yoyo Yonggo*. Lima Kepala Suku tersebut adalah lembaga adat yang terdiri dari asosiasi lima kepala suku dari lima marga besar yang ada dan meliputi *Yoka* sebagai kampung mereka. Lima marga di *Yoka* yang mempunyai *Hepala* suku dalam struktur keondoafian adalah *Mebri*, *Makuba*, *Olua*, *Tokayo*, dan *Ohee*.
- *Yo Yang/Ondofolo Obho Yokhu*
Yo Yang disebut juga dengan *Ondofolo Obho Yokhu*. Mereka ini dalam struktur keondoafian disebut rakyat biasa yang berada dibawah keondoafian *Hebaeibulu* Kampung *Yoka*.

Sentralisasi/Desentralisasi (*Centralization and Decentralization*)

Pemerintahan Adat *Hebaeibulu*, yang dalam penelitian ini penulis memandangnya sebagai suatu organisasi. Tentu saja adalah mengandung arti bahwa seorang *Ondofolo* adalah suatu figure "*Primus Antar Pares*" artinya seorang pemimpin yang kekuasaannya berada di tangannya dan dijabat secara turun – temurun. Hanya dapat diganti setelah meninggal dunia. Hal ini membuat penulis memberi kesimpulan bahwa segala sesuatu yang diputuskan oleh seorang *Ondofolo* sifatnya mutlak dan wajib untuk dipatuhi dan dijalankan sesuai perintah tanpa

melakukan banding atau sanggahan. Namun keputusan ini juga sebelumnya mendapat evaluasi dari penasehat – penasehat yang merupakan bagian dari lembaga *Abu Afa*.

Formalisasi (*Formalization*)

Di sebuah organisasi dengan tingkat formalisasi yang tinggi terdapat deskripsi tugas yang jelas. Beragam aturan organisasi dan prosedur yang didefinisikan secara tegas. Semakin besar standarisasi semakin kecil input yang dimiliki bawahan mengenai bagaimana suatu tugas harus di kerjakan. Standarisasi tidak hanya meniadakan kemungkinan bawahan untuk terlibat dalam perilaku – perilaku alternatif tapi juga menghapuskan perlunya bawahan mempertimbangkan alternatif.

Dalam Pemerintahan Adat Hebaeibulu sebagai suatu organisasi, terdapat kepemimpinan Sang Ondoafi yang secara hirarki harus mengacu pada hukum – hukum atau sumpah yang di ucapkan pada waktu pelantikan yang biasanya disebut dengan *Ondofolo Hangsang*. Dalam pelantikan Ondofolo ada empat sumpah yang menjadi hukum tak tertulis sebagai panduan pemerintahan seorang Ondofolo, empat hukum itu mempunyai konsekuensi, berkat dan kutuk.

Adapun keempat hukum tersebut dapat disimak pada kutipan berikut.

Hukum Pertama :

“yohu yomalo nyekhende, miyenale horafa obo yokhu ereimile holei narei nareimeli. Wakgena angne raunghinde nime haba khena buhei nasei meije wawaline mokhounde. Miye nale horafa Khena buhe khoimile holei narei neima khajjee nekhoi bonde na wawali uma buma randang khui kui meme wayobu yomalu eng wekhende”.

“Pada kampung yang akan kau pimpin, para janda, duda fakir miskin dan anak – anak terlantar serta segala orang yang terhina – dina dalam segala rupanya haruslah kau perhatikan dan kau jamin hak hidupnya. Hidupmu haruslah lemah lembut dan rendah hati dengan penuh kasih – mengasihi. Jikalau perintah ini kau indahkan maka hidupmu akan diberkati dan kau akan menjadi berkat bagi kampung dan rakyatmu”.

“In the village that will you lead, firstly, you have to save lives of widows, orphans, and homeless people. Feed and give shelter to them, lead your people humbly and gently, Help many people. Shall you do these you will be glorified and your village will be full of honey and bee”.

Hukum Kedua :

“U yollu, yohu moholu kilawale waro miye holei nereyee, wa bu a hiyo hiyo mayo mayo mayo. Waro miye hurende nalende”.

“Pada kedua aksesoris kampung yang kutambatkan di tubuhmu. Lambang tanggung jawab yang harus kau pikul dalam mengawinkan dan memberikan setiap generasi dari keturunan bangsawan di kampung ini. Dan generasi penerusmu akan berkembang biak”.

“These to village-accessories I tied mean you will responsible to feed your people. Your earth and lake will stire mani foods, and your generation will multiple”.

Hukum Ketiga

“Hure befionge a befionge; rakhe u yolune khukuii meme nime kaugei bume bune rangda hiyo hiyo mayo mayo.... (nama ondofofo) mayo hu malo hu enekende rajile wajje enainyale khanenanyale khelenaiyende hungayende”

“Dia berbalik ke matahari dan berkata kepada noken kampung ini kiranya mengalir berkat yang berlimpa ganda bagi kampung dan kejayaan (nama ondofofo di sebutkan) Dari timur ke barat utara ke selatan orang akan menyambut dan bercerita tentang namanya”.

“Turn to the sun and say: On these wristlets let the blessing of prosperity overflow on.... (mention the tribe’s name of the chief) village. Let people in small group or big group, at hous, garden, in the like, orland at mountain spread his name from east to west, from nort to south. Let his name be “glorified”.

Hukum Keempat

“Wayohhu malohu angwekhende wa abu afa, wa abu akho, wa khote findai na khen mbai u mbai na a mbai feu mbai ma akha bakhere ma yoho yonggore foi mokhomile holembenarembe. marenakhemiye mkhai erenayembe”.

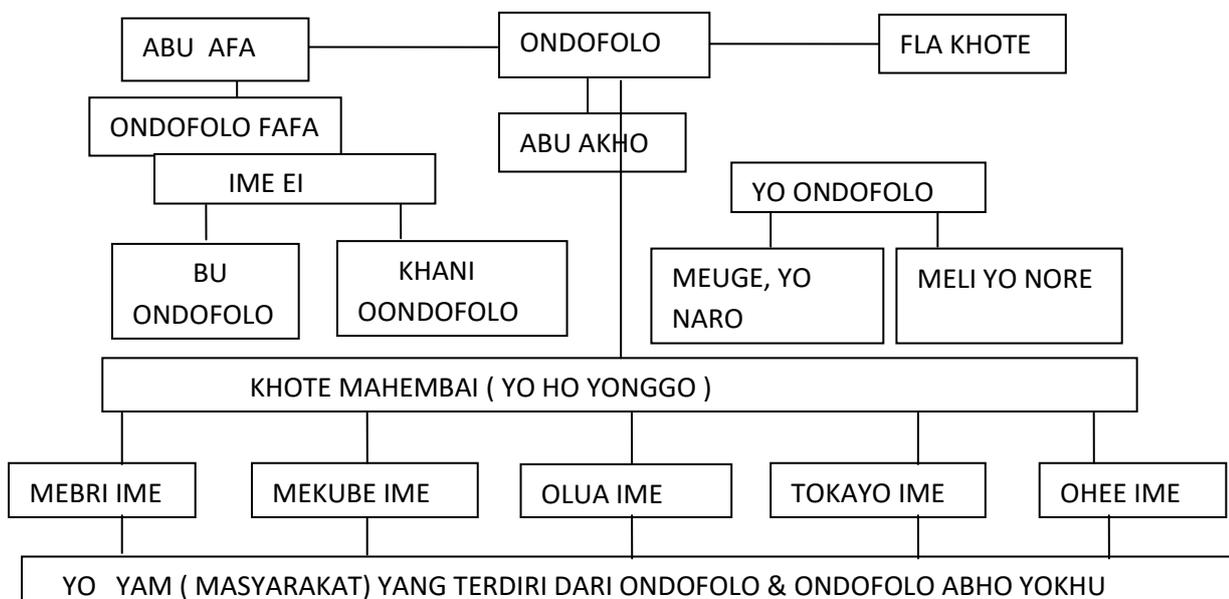
“Dalam kepemimpinanmu engkau harus bekerja sama secara baik dengan Abu Afa, Abu Akho, dan Khote Findei. Harulah kalian sehati sepakat dalam melayani rakyatmu. Biarlah kalian akan di lihat sebagai ibu kandung yang membesarkan kampung’.

“In your leadership abu afa, abu akho, and khotr findei are the people who will workwith you, Therefore, you all must be one heart, on soul, one word and larguege in serving and protecting your people.you all must be a good mother for allyour people”.

Keempat hukum di atas di terjemahkan sebagai bentuk formalisasi dalam ke- *Ondoafi*-an Hebaibulu Kampung Yoka. Hal itu menjadi dasar dan landasan seorang *Ondoafi* menjalankan kewajiban sebagai pimpinan bagi rakyatnya. Empat sumpah di atas merupakan fondasi hakiki, bagi kewajiban seorang *Ondoafi*, sehingga berdasarkan 4 hukum itu pula rakyatnya menjalankan aktivitas dan di lindungi sang *Ondoafi* .

Gambar 2.

Struktur Organisasi Pemerintahan Adat Hebaibulu Kampung Yoka



Sumber : Data Sekunder Pemerintahan Adat Hebbaeibulu Kampung Yoka, 2014

Hubungan Pemerintahan Adat Dan Pemerintahan Formal

Secara adat, masyarakat asli yang hidup di kampung Yoka dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang disebut "*ondofolo*" (pemimpin kampung). *Ondofolo* dibantu oleh "aparatus" adat yang merupakan suatu unit kepemimpinan kolektif "*Ke-Ondoafi-an Hebaiebulu*" Kampung Yoka yang sifat "birokrasi"-nya mengikat ke dalam namun tertutup atau terbatas untuk di publikasikan ke luar.

Dalam sistem birokrasi pemerintahan tradisional, *Ondoafi* adalah sebuah lembaga pemerintahan dimana orang yang menduduki "jabatan" tersebut memiliki otoritas dan kekuasaan terhadap bidang tertentu dari hajat orang banyak. Dalam birokrasi pemerintahan tradisional di Kampung Yoka, terdapat beberapa lembaga penting yang berfungsi dibidangnya masing – masing, dengan tujuan yang sama untuk menjaga kampung atau "*yo*". Dalam hal "tata pemerintahan" makna kata "*Ondofolo*" selain berarti Pemimpin juga diartikan sebagai penguasa.

Menurut *Ondofolo* Ismael Mebri, penguasa artinya memegang kekuasaan secara adat untuk mengurus bidang tertentu. Seorang disebut "*Ondofolo*" tetapi dari bidang tertentu dalam hajat hidup orang banyak. Misalnta Kepala suku Tukayo, dalam makna terbatas untuk momen tertentu bisa disebut sebagai "*Khani Ondofolo*" artinya penguasa di bidang pertanahan, karena dialah yang memegang hak adat yang terkait kutuk dan berkat, berkaitan dengan masalah tanah adat. Keplala suku Olua disebut "*ani yo hayo onbofolo*" figure yang berkuasa atas kutuk dan berkat menyangkut masalah pertanian yang ada pada kekuasaannya. Dan dalam tatanan adat hal tersebut telah diatur dengan jelas. Sekalipun hal itu tidak tertulis namun semua orang tahu bahwa *ondofolo* sebagai penguasa tidak berarti pemimpin. Sedangkan *ondofolo* sebagai pemimpin adalah pemimpin tertinggi kampung sekaligus penguasa tertinggi untuk mengatur semua yang ada pada kampung.

Masyarakat adat Yoka Hebaiebulu mengenal atau menganut dua stratifikasi social atau dua tatanan kelompok manusia dalam tatanan kelompok masyarakat yaitu kelompok kepemimpinan yang disebut dengan "*onbofolo Nau/naei u*", dan kelompok abdi *ondofolo* yang disebut "*Ondofolo Obho Yokhu*". Ilustrasi pengelompokan ini menggambarkan masyarakat adat secara struktur terdiri dari kelompok yang berkewajiban menjaga, melindungi dan menjamin keseimbangan hidup masyarakat, sekaligus berperan sebagai para pemimpin yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahan adat. Hal ini seperti yang terkandung dalam pernyataan *Ondoafi Hebaiebulu* Kampung Yoka sebagai berikut.

“Ondo berperan melindungi, menjaga dan menjamin keseimbangan hidup seluruharganya”. (Wawancara, 2014)

Berdasarkan hasil wawancara Ondoafi Hebaeibulu Yoka, Ismael Mebri diatas dapat di maknai bahwa seorang Ondoafi berkewajiban menjaga, melindungi, dan menjamin keseimbangan hidup masyarakatnya. Peran ini mengandung makna bahwa dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang berhak tetapi juga sekaligus berkewajiban mengatur dan menjalankan pemerintahan adat.

Kelompok manusia ini adalah “Ondofolo nau/naei u”ondofolo sebagai pemimpin dalam pandangan adat adalah penjelmaan “yo” kmpung itu sendiri, Ondofolo Nau/naei u artinya badan dari ondofolo /badan ondofolo.(Nau/naei u berarti badannya, terdiri dari dua kata yaitu “naie” artinya dia punya dan” u” berarti badan). Sedangkan kelompok kelompok abdi Ondofolo, adalah yang disebut hamba dan pelayan bagi ondofolo, tetapi bukan kelompok budak (dalam hal ini secara tegas disebutkan bahwa orang sentani tidak mengenal sistem budak).

Menurut Ondofolo Hebaeibulu Kampung Yoka, Ismael Mebri bahwa dalam struktur ke-*Ondoafi*-an, kelompok abdi umumnya terdiri dari tiga suku yakni Olua, Tokayo dan Ohee yang di singkat “OTO” dengan kepala sukunya masing – masing. Masyarakat adat disebut dengan “yo yang”. *Yo Yang* terdiri dari *Ondofolo* dan *Ondofolo Obho Yokhu*. Dalam aktifitasnya sehari – hari “yo yang” terjadi dalam dua kelompok yang memiliki perbedaan secara garis keturunan. Kelompok pertama disebut dengan “*Ime khabam*” artinya rumah besar. (Ime”rumah”, dan khabam “besar”) Dan kelompok kedua disebut dengan “*Ime name*” yang artinya tiga rumah (name artinya tiga), ime khabam terdiri dari Mebri ime, Makube ime, sedangkan Ime name terdiri dari Olua ime, Tokayo ime, Tokayo ime dan Ohee ime.

Struktur dan mekanisme kelembagaan Pemerintahan Adat ini memiliki tugas – tugas yang mirip dengan tugas – tugas dalam Tata Pemerintahan Formal di kota Jayapura. Dimana tugas – tugas seorang Ondoafi seperti yang tertuang dalam sumpah jabatannya memiliki makna mendalam bagi kelangsungan kehidupan masyarakat di kampungnya. Tugas – tugas itu diantaranya menjaga mewujudkan kesejahteraan, memelihara kaum miskin dan terhina, termasuk mengayomi para janda dan anak – anak yatim piatu, mengusahakan keamanan dan ketertiban rakyatnya. Hal inipun tidak jauh berbeda dengan tugas – tugas Pemerintah seperti yang disebutkan (Ryaas Rasyid 1997:11-13) tugas pemerintah formal adalah, **pertama**, Menjamin keamanan Negara. **Kedua**, Memelihara Ketertiban. **Ketiga**, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakanginya. **Keempat** , melakukan pekerjaan umum dan pelayanan publik. **Kelima**, melakukan upaya – upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. **Keenam**, menerapkan kebijakan ekonomi. **Ketujuh**, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa tugas – tugas pokok pemerintahan formal akan berhasil dan mendapat dukungan jika nilai – nilai positif dalam sistem pemerintahan adat dapat dimengerti dan dimaknai oleh para pemangku kepentingan yang menjalankan tugasnya sebagai aparaturnegara di kampung – kampung yang masih memelihara dengan tegas sistem, nilai, dan mekanisme pemerintahan adatnya karena disana lah keamanan, ketentraman dan kesejahteraan itu dapat diwujudkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pemerintahan Hebaeibulu Kampung Yoka mengalami perkembangan yang signifikan dan masih eksis beraktifitas. Hal ini ditandai dengan kepatuhan dan ketaatan masyarakat di Kampung Yoka terhadap kepemimpinan Ondoafi dengan system dan mekanisme pemerintahan adatnya.

Saran

Berdasarkan pembahasan, perlu disampaikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi kelangsungan pemerintahan tradisional di kampung Yoka. Pemerintah Daerah melalui Kepala Pemerintahan Kampung dan Kepala Distrik harus membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintahan Adat Hebaeibulu di Kampung Yoka. Program pembangunan akan berhasil dan membunuh serta mendapat dukungan dari masyarakat di kampung jika para pemangku kepentingan yang ada di kampung Yoka, seperti (Kepala Pemerintahan kampung, Gereja,dll) menghargai dan mengakomodir nilai – nilai positif dalam adat dan menerapkannya pada pemerintahan Formal.

Untuk Masalah regenerasi, penyelesaian masalah kepemimpinan dalam struktur Pemerintahan Adat Hebaeibulu Yoka harus segera diselesaikan agar kesejahteraan rakyat seperti didambakan dapat dicapai melalui eksistensi lembaga ini. Perlu penelitian lanjut mengenai Pemerintahan Adat dalam rangka meningkatkan pengetahuan regenerasi mudah mengingat potensi degradasi nilai – nilai kearifan budaya lokal semakin nampak disegala sendi kehidupan salah satunya menurunnya ketertarikan untuk mempelajari adat-istiadat yang menjadi identitas suatu kaum atau suku bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Jhon Norotouw, 2012, *Save Our Papua, Indonesianisasi VS Papuanisasi*, Cergas Media, Jakarta.
- Arifin Indar, 2010, *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- B . Miles & A.Mitchael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi), Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, ddk, 2002, *Sistim Pemerintahan Indonesia* (edisi revisi), Rineka Cipta, Jakarta.
- Richard Olu. (2000) : *Agama Suku. Budaya dan Injil; Suatu Analisis Antropologis – Teologis dari masyarakat Yoka, Sentani Timur Papua*(skripsi S1).
- Ryaas Rasyid, 1997, *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika Dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone dan MIPI, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Stephen P. Robbins, 2008, *Perilaku Organisasi*, (buku 2), Selemba Empat, Jakarta.
- Weber Max, 1947, *Essays in, New York*, Oxford-University Press.

Informan Wawancara

Deda Andreas 2006 : "Yoka Dulu, Kini, dan Akan Datang" (Hebaeibulu Nabherehele, Manahe, Benaya Honoifioye).

Deda A. Mebri Rudy, 2009 : "In Memoriam of Mesak K.Mebri" (Figur Mesak K Mebri Ondofolo Besar Yoka).